

## CYBERPANOPTIC: EKSPERIMENTASI DAN (TRANSPARANSI) KUASA PENGAWASAN

### CYBERPANOPTIC: EXPERIMENTATION AND (TRANSPARENCY) POWER OF CONTROL

**Hery Prasetyo**

Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Jember

Pos-el: heryprasetyo83@gmail.com

#### Abstrak

Artikel ini memfokuskan pada isu *Cyberspace* dengan pertanyaan “bagaimana subjek mereproduksi kehadirannya dalam ruang teknologis?” Ruang teknologis yang dimaksudkan merupakan ruang yang tercipta melalui perkembangan jaringan teknologi informasi atau internet. Internet booming dalam kesejarahan gerakan sosial di Indonesia lekat dengan persoalan persebaran informasi dibawah rezim otoriter, yang secara tertata menempatkan kebenaran sebagai kebenaran yang terkontrol dan terpusat. Dititik ini internet mampu membongkar tatanan dan narasi kebenaran penguasa. Namun menjadi ironis ketika kehadiran internet hari ini membawa konsekuensi pada ruang kehadiran subjektivitas massal, cair dalam ketercepatan teknologi dan kehendak menjadi dalam bentuk eksperimentasi tanpa batas. Eksperimentasi yang merujuk pada tekstualitas dan visualitas subjek dihadirkan sebagai tendensi kesadaran dalam tataran politik dan sekaligus merepresentasikan dimensi kultural yang secara diskursif tampak meniadakan dalam objektivitas virtual. Kondisi ini bagi penulis merupakan bagian dari keruangan yang menandakan kehadiran subjektivitas yang dibentuk dalam tatanan kapitalisme lanjut. Tatanan tersebut mampu menyentuh pada ruang ketidaksadaran sosial. Khususnya pada bagaimana ragam kehadiran yang ditempatkan sebagai partikularitas kesadaran diri hanya menjadi varian representasi bahasa tanpa merujuk pada gerak formasi materialitas yang direpresentasikannya.

**Kata kunci:** eksperimentasi, kuasa pengawasan, politik kehadiran, virtualitas.

#### Abstract

The article focuses issue of cyberspace with question “how subjects reproduce their presence in technological space?” Technological space is a space that is created through information or internet technology network development. Internet booming in Indonesia’s social movement historicity attached with problem of information spreading under authoritarian New Order Regime that systematically placed truth which is controlled and centered. In this point, internet is able to uncover order and narration of truth from the ruler. But internet became ironic when its presence brought consequences into mass subjectivity presence space, fluid in up to speed technology and the will of becoming in experimentation form without limits. Experimentation which referred to subject’s textuality and visuality is presented as consciousness tendency in political order and at the same time, represented cultural dimension that discursively appeared to negate in virtual partial objectivity. This condition, for writer, is part of spatiality which signify the presence of subjectivity that is formed in late capitalism order. The order is able to touch social unconsciousness space. Especially, on how kinds of presence which are placed as self-consciousness particularity are only become kinds of language representations without refer to materiality formation movement that were represented.

**Keywords:** experimentation, power of surveillance, politic of presence, virtuality

## A. Pendahuluan

*Cyberspace* merupakan ruang bagi penciptaan diri subjek yang terkoneksi dan melampaui batas-batas teritori fisik (Benedikt, 2000). Pada titik inilah terjadi permasalahan-permasalahan dengan bentuk kehadiran subjek tidak lagi dirujuk pada bentuk-bentuk yang bersifat fisik dan tiga dimensional. Subjek hadir melalui bentuk visual dan tekstualnya. Kondisi ini bagi Turkle merupakan bentuk subjektivitas baru, *we are encouraged to think of ourselves as fluid, emergent, decentralized, multiplicitous, flexible, and ever in process* (Turkle, 2014). Turkle memperkenalkan tentang subjektivitas baru yang bermain dalam ruang simulasi. Subjektivitas baru yang dikonseptualisasikan dengan “eksperimentasi”, dengan meletakkan identitas dan materialitas sebagai yang disamarkan dalam virtualitas (Turkle, 2014).

Dalam konteks ini, reproduksi subjek dalam *Cyberspace* merupakan bagian dari subjek untuk menghadirkan dirinya dengan membentuk formasi visualitas dan tekstualitas sebagai identitas subjek. Identitas subjek yang ditampilkan oleh Setyaningrum dikonseptualisasikan sebagai *avatar* (Setyaningrum, 2014), yakni bentuk kehadiran diri secara estetis tanpa terbentur oleh dinding-dinding aturan normatif dan moralistik. Berbeda dengan Setyaningrum, bagi penulis, kehadiran subjek merujuk pada pembentukan diri yang terbelenggu dan terepresi oleh yang sosial, ketika yang sosial membentuk kategori-kategori yang bersifat membentuk subjek dalam normalitas. Normalitas yang dimaksud adalah representasi pengetahuan yang menjadi rujukan dari yang sosial dalam mengidentifikasi dan memasukkan subjek ke dalam kategori pengetahuan yang secara objektif ada dan beroperasi di dalam sistem pengetahuan. Andaiapun *avatar* menjadi sebetuk estetika visual dari formasi identitas subjek, lalu apakah yang mendasari identitas ketika dirinya berada di hadapan yang sosial?

Adakah cara lain dari yang sosial untuk mengobjektivikasi yang ada di hadapannya tanpa merujuk pada sistem pengetahuan? Represi yang sosial ini merupakan ruang bagi bekerjanya relasi kuasa/pengetahuan. Pengertian ini sejalan dengan pengertian Foucault (2002) dalam melakukan pembacaan atas entitas kultural yang tampil dalam dan di hadapan yang sosial.

Menurut Sen dan Hill (2005), *Cyberspace* menjadi bagian penting bagi penciptaan ruang-ruang demokratis di Indonesia. Sedangkan Merlyna Lim melalui *The Internet, Sosial Networks, and Reform In Indonesia* (Lim, 2014), meneliti perkembangan penggunaan Internet di Indonesia dengan menghubungkannya dengan perkembangan demokrasi. Internet mejadi sumber bagi persemaian ide-ide demokrasi dan transformasi sosial. Melalui internet, ide-ide disebarluaskan untuk melawan rezim pemerintahan otoriter ketika segala sesuatu yang berkaitan dengan ide “lain” dengan ide yang dilegitimasi oleh pemerintah sengaja dihanguskan.

Pascareformasi menghadirkan artikulasi virtual dengan varian isi dan bentuk yang menampilkan subjek dengan menempatkan dirinya sebagai titik tolak yang menampilkan ruang interpelatif. Pengertian ini terletak pada bagaimana virtualitas ditampilkan secara definitif dengan menunjukkan keberpihakan pada gagasan atau sistem ideologis. Di titik lain, titik ideologis yang ditampilkan menjadi bentuk simulatif. Di dalamnya, subjek menampilkan jejaring penandaan dan formasi bahasa yang secara teknologis dapat mengaburkan akar visualitas. Di saat bersamaan kondisi tersebut berujung pada pembacaan formasi subjektivitas yang menjadi terbatas pada representasi teknologis. Sementara itu, tendensi ideologis yang ditampilkan dimampatkan pada representasi subjek. Apa yang kemudian dilakukan oleh subjek ketika teknologi secara diskursif mampu menampilkan jejaring penandaan yang cair dan mengambang dalam kemampuan representasi?

Dalam hal ini, penulis membangun narasi diskursif pada praktik kebudayaan subjek dalam *cyberspace*. Praktik kebudayaan dikembangkan mengandaikan adanya manusia yang hidup di dalamnya. Melalui kebudayaan, manusia saling interaksi secara dialogis dan membentuk sistem organis. Konsep praktik kebudayaan dimaksudkan untuk menekankan bahwa dalam kehidupan sosialnya manusia melakukan seperangkat cara hidup dalam berinteraksi dengan manusia lainya. Konsepsi bukan hanya menempatkan yang sosial sebagai yang fungsional, tetapi hendak menempatkan adanya operasi fungsionalistik pada relasi kuasa, sehingga hadirnya subjektivitas ditampakkan sebagai entitas partikular. Dengan menghadirkan bentuk dialogis dari sistem organis, diskursifitas wacana yang merepresentasikan subjek merupakan bagian dari pertarungan adanya formasi sosial. Di titik inilah praktik kebudayaan dikonseptualisasikan oleh penulis. Praktik kebudayaan ini menjadi problematis ketika dijelaskan tanpa memahami dan menunjukkan bentuk kritisisme subjek dalam menghadirkan dirinya dalam *cyberspace*. Praktik kehadiran subjek merupakan bagian dari bagaimana kebudayaan direpresentasikan dalam bentuk visual dan tekstual oleh subjek. Dalam konteks artikel ini, bentuk visual dan tekstual dimaksudkan sebagai teks yang dihadirkan oleh subjek. Tiap-tiap subjek memiliki kebebasan sepenuhnya untuk melakukan praktik-praktik kebudayaan dengan konteks dan teks yang menjadi basis identitasnya. Hal inilah yang membedakan studi penulis dengan studi Kresha Sen, David Hill, dan Merlyna Lim, terutama, ketika penelitian sebelumnya memfokuskan diri pada *cyberspace* dalam konteks demokratisasi dan penciptaan *civic space* sedangkan penelitian ini memfokuskan pada formasi identitas subjek.

## B. Metodologi dan Kerangka Teoretik

Dalam konteks metodologis, tulisan ini mengembangkan gagasan tentang kebudayaan yang beroperasi secara ideologis, yang secara

khusus direpresentasikan melalui pertarungan pengawasan dalam mendisiplinkan dan menata kehadiran subjek. Dalam konteks teoretik, konsepsi yang dikembangkan penulis dapat dirujuk pada perspektif Foucaultian. Konsekuensi dalam tulisan ini tampak pada seperangkat narasi yang menggunakan formasi diskursus sebagai bagian untuk menampilkan dan sekaligus membungkam dan meniadakan wacana yang "lain", sehingga tampilnya kerangka berpikir tentang kebenaran diposisikan sebagai yang rasional dan natural tanpa memberikan kesempatan untuk adanya ruang bagi yang "lain".

Penulis menempatkan wacana formasi kehadiran subjek dalam *cyberspace* dengan kontekstualisasi pada isu politik. Dalam konteks ini penulis merujuk pada bagaimana wacana subjek yang merepresentasikan perbedaan dalam *civil society* hendak membicarakan dirinya dan arah keberpihakan dirinya pada era digital. Tanpa merujuk pada contoh spesifik, penulis hendak menyusun narasi persoalan formasi subjek dalam *cyberspace*. Strategi ini dipilih untuk menghadirkan keserempakan kehadiran subjek dalam konteks kekiniannya dan mode pertarungan kuasa untuk meraih legitimasi dalam *cyberspace*.

## C. Civic Space dan Representasi Politik Kebudayaan

Pemerintahan Orde Baru hidup di dalam era teknologis yang secara perlahan menghadirkan bentuk baru kewarganegaraan. Globalisasi tidak hanya menyentuh persoalan ekonomi-politik dan keruangan produksi kultural. Persebaran teknologi mendorong bentuk relasi sosial yang tidak dapat dipikirkan melalui kerangka tradisional kenegaraan. Pada titik ini, bentuk kewarganegaraan melampaui bentuk fisik dan perlahan beralih pada digitalisasi warga negara.

Apa yang kemudian secara responsif dilakukan pemerintah ialah mengeluarkan kebijakan negara untuk tetap menggunakan

seluruh kekuatan media informasi guna menyebarluaskan ide dan gagasan identitas nasional sebagai negara berkembang yang berorientasi pada pembangunan sistem ekonomi. Dalam hal ini, media diposisikan sebagai alat propaganda. Dengan demikian, kontrol pemerintah terhadap media menjadi bagian dari mode propaganda negara. Pemusatan pada arah perkembangan ekonomi secara struktural telah menghadirkan bentuk warganegara yang dibayangkan harus terus tunduk pada arah kebijakan negara.

Pada akhir pemerintahan orde baru, pertarungan negara yang ditampilkan secara tradisional dengan perkembangan teknologi yang direpresentasikan oleh internet dan *cyberspace* mulai menunjukkan persoalan tersendiri, yakni pada penciptaan wacana anti pemerintahan. Kekuatan internet sebagai pengembangan jaringan perlawanan pada *cyberspace* menampakkan kemampuannya untuk menyebarluaskan gagasan antihegemoni dan memunculkan kekuatan massa untuk menuntut mundurnya Soeharto. Meskipun pada era pra-reformasi pengguna internet di Indonesia masih berkisar 1% dari total seluruh populasi, angka ini seringkali dikaitkan dengan kelas menengah atas dan berpendidikan yang diasumsikan sebagai kelompok antihegemonik (Hill, 2005). Perkembangan teknologi media informasi dihadapkan pada persoalan netralitas ideologi sehingga tidak dapat merefleksikan kekuatan sosial politik yang ada dalam masyarakat. Konsekuensi yang kemudian muncul ialah pengguna internet ini berdasarkan jumlah dan aksesnya terhadap kekuasaan pemerintah tidak memiliki posisi tawar untuk mengubah struktur kekuasaan yang dominatif dan hegemonik. Sementara itu, perkembangan media radio dan televisi ditempatkan pada penyebaran konten media yang harus merepresentasikan netralitas dan sedapat mungkin mempertahankan status quo.

Internet kemudian muncul sebagai bagian dari kritisisme kelas terdidik untuk menem-

patkan gagasannya. Tanpa dipusingkan oleh persoalan netralitas dan muatan ideologis pemerintah, internet menjadi ruang cair yang secara cepat mampu menyemai gagasan anti-totaliterisme. Hal ini menjadi menarik justru ketika elitisme internet tampil sebagai yang memungkinkan persebaran gagasan dengan diikuti oleh munculnya konsep Warnet, 'Warung Internet'. Konsep tersebut dikembangkan dari kata *warung* yang memiliki relevansi dengan konsep 'warung' yang dalam keseharian merupakan tempat bertemunya subjek untuk berinteraksi (jual-beli). Di warung jamak ditemui pertukaran ide atau gagasan dalam membicarakan permasalahan sehari-hari subjek. Sedangkan Warung Internet merepresentasikan hal yang sejalan dalam konsep warung tempat setiap pengguna internet bertemu dan berinteraksi serta mempertukarkan ide dan gagasan dalam ruang virtual. Penggunaan sekat-sekat pemisah antarpengguna internet, sebagai simulasi kategoris antara yang privat dan yang publik di dalam warnet, menimbulkan kesan penciptaan ruang tanpa sensor, yaitu setiap pengguna mendapatkan kebebasan tanpa terdeteksi oleh pengguna lain dalam keruangan fisikalnya.

Internet mampu menghadirkan peniadaan perantara yang global dan yang lokal, yang nasional dan yang internasional dalam pertukaran informasi, mampu menciptakan iklim demokratisasi dalam *cyberspace*. Arus informasi yang selama ini menjadi tabu tidak lagi mendapatkan batasan-batasan untuk mendapatkannya. Di satu sisi, perkembangan penggunaan internet sebagai sarana pertukaran informasi menunjukkan kemampuannya sebagai penciptaan ruang bagi *civil society*. Di sisi lain, hal itu mengembangkan ruang bagi pasar untuk mendapatkan keuntungan dari tersebarnya minat akan penggunaan internet.

Konsep *civil society* mengharuskan adanya *civic space*, sehingga ruang bagi praktik kehidupan *civil society* dapat bekerja secara dialogis. Hal ini sekaligus menempatkan

negara sebagai yang ada dan tampil secara hegemonik. Menjadi ironis ketika kehadiran negara menjadi sebetuk totalitarianisme yang secara sistematis menghendaki dirinya menjadi kekuatan tunggal dalam menyusun arah dan gerak ideologi yang ditampilkan sebagai ideologi Pancasila (Krissantono, 1976) untuk membangun normalitas pada realitas bernegara.

Dengan kata lain, *civil society* pada era Orde Baru secara sistematis dibentuk melalui ketertataan entitas pembentuknya sehingga negara menjadi berjarak dan menempatkan *civil society* secara terpisah atau yang disebut dengan konsep massa mengambang. Tidak adanya ruang bagi *civil society* yang dinamis dan otonom, oleh Lim dikonseptualisasikan sebagai *Soeharto's Panopticon*<sup>2</sup>, untuk merujuk pada sistem pengawasan bertingkat dalam tatanan Orde Baru. Baik tatanan bertingkat secara sipil, yaitu melalui pemerintah dari pusat sampai Rukun Tetangga. Dalam struktur komando militer terdapat pengawasan berjenjang mulai dari kodam, kodim, koramil. Pengamanan bertingkat ini menunjukkan adanya pengawasan total kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi entitas pasif, berjarak, dan mengambang yang mudah dikontrol dengan menggunakan struktur elit.

Hadirnya internet sebagai *Civic Space* (Lim, 2002), membawa konsekuensi berubahnya tatanan sosial, politik dan ekonomi masyarakat. Konsep *Civic Space* dipergunakan untuk merujuk ruang praksis bagi *civil society*. Dalam konteks ini, konsepsi Gramsci (1992) tentang *Civil Society* menjadi penting dalam memosisikan arena bagi tampilnya entitas sosial dalam relasinya dengan negara dan *political society*. Dalam pengertian lain, *civil society* menjadi arena hegemoni untuk tampilnya dominasi negara. Pada titik ini, *civil society* menjadi arena entitas sosial untuk menghadirkan artikulasi kepentingannya,

yang secara *overdeterminant* berujung pada perjuangan ekonomi. Konsepsi ekonomisme merujuk pada ketertataan struktur sosial dalam menempatkan susunan relasi sosial, tanpa direduksi dalam persoalan ekonomi murni. Gramsci menunjukkan adanya artikulasi kultural dari entitas sosial dan bagaimana yang sosial lekat dengan perjuangan ekonomi untuk mereproduksi sosialitasnya.

Internet hadir dalam ruang konstruktif bagi penciptaan *Civic Space* yang sedapat mungkin dikontrol oleh Negara dengan tatanan moralitas yang berpijak pada pengetahuan dan kekuasaan dominan. Bentuk kontrol ini dipraktikkan oleh negara dalam penguasaan teknologi informasi dan media, mulai dari media cetak sampai dengan media elektronik. Koran dan majalah ditata dalam Surat Ijin Usaha Percetakan dengan memberikan syarat-syarat yang bersifat politis dan administratif. Radio terkontrol kedalam perizinan, cakupan wilayah, dan *content* berita sengaja diposisikan untuk *me-relay* RRI, serta televisi dengan tegas diatur oleh Orde Baru merupakan kondisi dari praktik penataan teknologi informasi dan media.

Internet dengan *cyberspace* memberikan ruang praktik yang plural dalam menegasikan bentuk-bentuk kontrol pada praktik subjek di dalamnya. Melalui kemudahan atau perluasan pasar yang dilakukan penyedia sarana telekomunikasi, internet hampir dapat dinikmati dimana saja dan kapan saja. Persebaran pengguna dan penggunaan internet, tidak lagi dapat dideteksi oleh negara.

Setiap subjek memainkan dirinya dalam berbagai macam permainan dan pertarungan dalam penciptaan dirinya sebagai suatu formasi identitas di dalam *cyberspace*. Dengan kehadiran subjek dalam *cyberspace*, apakah identitas subjek hanya bermain pada tataran simulasi? Apakah bentuk kehadiran subjek terpusat pada bentuk totalitas antara yang

2 Bandingkan Foucault, Michel. 1999. *Panopticon*. Dalam Evans, Jessica dan Hall, Stuart. *Visual Culture The Reader*. London: Sage. Dan dengan, Lim, Merlyna. *Cyber-Urban Activisme and Political Change in Indonesia*. [http://www.public.asu.edu/~mlim4/files/Lim\\_M\\_8\\_pubs.pdf](http://www.public.asu.edu/~mlim4/files/Lim_M_8_pubs.pdf) Diunduh Tanggal 17 Mei 2014. Pukul 04.00.

real dan yang virtual? Pertanyaan tersebut membawa pada bentuk permainan subjek dalam ruang pembentukan dirinya, yaitu formasi identitas sebagai ruang relasi kuasa/ pengetahuan.

Tampilnya *civil society* dalam konstelasi politik tidak dapat dipisahkan dari *civic space*. Melalui *civic space*, diimajinasikan adanya entitas sosial yang secara diskursif menyusun kritisismenya untuk berhadapan dengan pluralitas entitas sosial lain. Tetapi, kondisi *civic space* menjadi bentuk yang ditempatkan sebagai yang mengancam stabilitas politik dan mengancam gerak pembangunan yang berlandaskan Pancasila. (Bandingkan dengan, Robinson, 2009).

Munculnya *cyberspace* sebagai cara untuk menempatkan dan menghadirkan *civic space*, ditandai merebaknya aksi-aksi perlawanan antikekuasaan Soeharto hingga pada akhirnya dapat meruntuhkan kekuasaan otoriter Soeharto pada 1998. Ruang baru ini merupakan ruang bagi pertarungan identitas yang secara politis menampilkan ruang baru bagi praktik-praktik budaya dan politik secara bersamaan.

Pada bentuk yang lebih ekstrem, persoalan *cyberspace* dan pertarungan ideologis direpresentasikan dengan isu terorisme. Penggunaan *Black Berry Messenger* (BBM) mampu menjadi medium pertukaran informasi tanpa mengharuskan adanya kontrol negara. Dari tersebut muncul, negara menghendaki adanya model yang memungkinkan negara dapat memasuki jaringan BBM dan melakukan kontrol pada informasi yang beredar di dalamnya.

Hari ini internet tidak lagi menjadi konsumsi terbatas pada kelas menengah dan terdidik perkotaan (lihat Kemkominfo, 2014). November 2013, pengguna internet berada pada kisaran angka 63 juta. Januari 2014 angka tersebut naik pada kisaran 72 juta. Data terakhir Depkominfo, Mei 2014 berkisar 82 juta pengguna. Jumlah tersebut berada pada kisaran 32% dari penduduk Indonesia. Meningkat pesat dari era pra-reformasi yang berkisar 1%.

Dalam lima tahun terakhir, pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 430%. Kondisi ini membawa pada konsep yang secara deferensial menempatkan *cyberspace* sebagai *civic space* dengan arah yang berbeda dan sekaligus membawa pada bentuk subjektivitas "baru". Kartajaya, secara definitif membicarakannya sebagai Netizen (2013).

Penandaan konsep Netizen, menjadi bagian untuk mengakumulasi efek perkembangan teknologi, khususnya pada bagaimana subjek dan entitas sosial yang berada dan menjadi bagian dari *Civil Society*, direduksi menjadi sekumpulan subjektivitas virtual. Hal itu tampak pada perkembangan *smartphone* untuk meningkatkan efek privat yang terbatas pada warnet. Sebuah kondisi kontradiktif ditunjukkan pada bagaimana Netizen diubah menjadi keterhubungan secara langsung dan tanpa mengenal batasan, justru ketika teknologi diciptakan sebagai konsekuensi dari kapitalisme lanjut (Jameson, 1984).

Hadirnya konsep Netizen menjadi penanda adanya bentuk keterhubungan antara akar identitas yang tersusun dalam kerangka *nation state*, secara kontradiktif dihadapkan pada bentuk ketiadaan identitas *nation state*. Kontradiksi ini terletak pada pelekatan *net* yang mengandaikan adanya jejaring subjektivitas tanpa dilekati persoalan batasan fisik. Sementara, *izen* yang berakar dari *citizen*, mengandaikan subjektivitas entitas atau subjek hukum yang berada pada kerangka negara. Persoalan ini menjadi pelik pada bagaimana kondisi Netizen ini dibentuk pada diskursus liberalistik khususnya pada bagaimana dirinya dilekatkan pada keintegrasian langsung dengan pasar. Secara kuantitatif, data yang dilansir oleh Kominfo menyebutkan bahwa di Indonesia, 80% pengguna jejaring Internet berusia 15-18 tahun. Sedangkan *website* yang banyak dikunjungi adalah penyedia jasa jejaring sosial.

Tampilnya *cyberspace* sebagai *civic space* secara tragis berujung pada penempatan ruang individuasi yang berintegrasi pada

pasar dan kecepatan informasi. Dalam konteks ini, *civic space* yang mengandaikan adanya kritisisme atas keterbatasan fisik pada ruang publik berujung pada persebaran diskursus liberalisme dengan menempatkan adanya *civil society* yang hadir dalam menyuarakan dirinya dan kepentingannya. Semangat menghadirkan ruang dalam keterbatasan dan penataan subjektivitas menghadirkan subjek yang terdisiplinkan secara administratif-birokratis dan menjadi pertarungan meraih legitimasi massa.

Tampilnya *change.org* dan *petitionline.net* menjadi bentuk yang dalam praktiknya diarahkan untuk memunculkan kritisisme subjek Netizen yang secara bersamaan hendak membicarakan tema kritik sosial yang melekat pada konsep *citizen*. *Change.org* yang berpusat di Amerika mengusung gagasan tentang bagaimana menggunakan *cyberspace* sebagai *civic space* dengan mewacanakan pluralitas isu yang dimiliki dan dialami subjek<sup>2</sup>. Dalam konteks ini isu yang ditampilkan pada publik memiliki strategi penyampaian untuk dapat diterima. Isu diarahkan untuk secara spesifik menyentuh praktik subjek dan mengarah pada kewenangan subjek untuk terlibat pada isu yang diusung. Proses tersebut menyentuh subjektivitas yang privat untuk ditampilkan secara sosial dalam *civic space*. Narasi yang dihadirkan untuk meraih keterhubungan dengan subjek Netizen dibentuk secara personal melalui narasi romantik kekinian yang tragis. Di titik ini, subjek membentuk sebuah ruang untuk memanggil empati dan kehendak untuk dapat dilartukan dan terlibat dalam bentuk penandatanganan petisi secara *online*.

Dalam cara yang sama *petitionline.net* menawarkan model keterlibatan *civil society*

dalam *cyberspace*, dengan menggagas isu dan menawarkannya secara *online*. Cara kerja yang dipergunakan terletak pada pernyataan secara *online* yang dikirimkan pada subjek yang ditarget. Meskipun model ini banyak berkembang dalam beberapa tahun belakangan,<sup>3</sup> media sosial ini harus membayar untuk dapat ditampilkan secara berkala, khususnya berkaitan dengan perkembangan petisi yang digagas. Tetapi, persoalan gagasan yang ditawarkan sebagai petisi hanya tampil sebagai varian dalam sesaknya *civic space* dalam pertarungannya dengan individuasi liberalistik. Hal ini ditampakkan dengan jumlah penandatanganan yang mencapai ribuan, lebih rendah daripada jumlah pengguna internet.

Pembacaan tentang praktik kebudayaan subjek dalam *cyberspace* merupakan penghadiran yang bersifat universal serta autentisitas praksis melalui teks dan konteks. Universal dalam pengertian bahwa penghadirannya merupakan bentuk artikulasi dan praktik subjek. Universalitas ini tidak dirujuk dalam pengertiannya yang bergerak secara positivistik melainkan pada praktik kebudayaan dalam penghadiran subjek melalui formasi identitas.

#### **D. Formasi Teoretik Arsitektur Digital: Ihwal Mode (Transparansi) Pengawasan dan Kontestasi Eksperimentasi**

*The Panopticon is a machine for dissociating the see/seen dyad: In the peripheric ring, only is totally seen, without ever seeing: In the center tower, one sees everything without ever being seen (Foucault, 1995:201).*

Isu tentang kondisi *panoptic* merujuk pada kondisi ketertampakan totalitas dalam momen seketika. Secara etimologis *panoptic* berasal dari bahasa Yunani *panoptos*, yang berarti

3 Dalam konteks ini selengkapnya dapat dirujuk pada, Usman Hamid & Arif Azis: *Mengubah Indonesia dengan Petisi*. 2013. <http://www.perspektifbaru.com/wawancara/920>. Diunduh 20 Mei 2014. Pukul 19.10. wib. Bandingkan dengan website *Change.org* dan *Petitionline.net*.

4 Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 9 petisi yang secara kuantitatif dapat meraih perhatian publik. Salah satunya berkaitan dengan issue TKI dan Pelecehan seksual. Selengkapnya baca "9 Petisi Online Yang Berhasil di 2013". 2014. <http://www.tempoco.com/read/news/2013/12/31/072541293/9-Petisi-Online-Yang-Berhasil-di-2013/1/0>. Diunduh 20 Mei 2014. Pukul 20.00. Wib

'ditampilkan pada semua'.<sup>4</sup> Hal ini kemudian merujuk pada bagaimana sebuah objek tampil dalam kemudahan untuk `ditampilkan materialitasnya. Kompleksitas yang muncul kemudian, bagaimana objek dapat diposisikan dalam keruangan yang memungkinkan untuk dikenali atau diobjektifikasi keberadaannya.

Dalam konteks ketertampakan tersebut, objek diandaikan berada pada pusat jejaring visualitas yang menangkapnya sebagai objek. Persoalan apa dan bagaimana objek dikenali sebagai objek dalam naturalitas objektif, tampak dikesampingkan dalam konteks ini untuk meraih ketunggalan objek yang ditangkap sebagai yang ada keberadaannya. Persoalan yang kemudian menjadi penting ialah bagaimana sebuah kondisi *panoptic* merepresentasikan totalitas ketampakan yang secara objektif dapat membentuk formasi kekuasaan atas objek yang dilihat.

Perkembangan atas model *Panopticon* diletakkan pada sistem pengawasan yang dikembangkan oleh Bentham untuk mengaplikasikan konsep pengawasan dalam penjara<sup>5</sup>. Secara arsitektural, dibangun suatu menara di tengah dan menjadi pusat dari penjara. Melalui menara ini seluruh aktivitas tahanan tertampakan dan teramati penjaga. Melalui menara ini muncul bentuk kepatuhan dan kesadaran adanya pengawasan secara total dan terus-menerus dari pengawas penjara. Pengawasan dilakukan melalui tatapan atau penangkapan bentuk visual yang dikondisikan melalui suasana dan ruang transparan dari kehadiran subjek. Sedangkan konsep permainan merupakan praktik yang dilakukan oleh subjek untuk menciptakan kehadiran diri pengawas dan yang diawasi.

Lampu sorot sebagai simulasi dari tatapan tampak dalam kehadirannya yang tidak mampu ditembus oleh subjek yang terawasi. Artinya, ketika subjek telah terobjektifikasi

sebagai objek, baginya tidak ada lagi ruang pembalikan kondisinya. Subjek akan selalu menjadi objek tanpa mampu mengubah dirinya sebagai subjek kembali. Ketidakmampuan ini ditampilkan ketika simulasi lampu sorot ini menghadirkan bentuk ketidakhadiran dari subjek pengawas. Subjek yang berada di belakang lampu sorot ini ditampilkan dalam ruang yang tidak menampilkan dirinya. Dalam hal ini, subjek yang terawasi tidak dapat mengetahui apakah dirinya benar terawasi atau hanya lampu sorot yang mendisiplinkan mereka dengan kondisi terawasi.

Dalam konsepsi penjara *panoptic* ini, subjek yang terobjektifikasi di hadapan lampu sorot ditempatkan dalam ruang terbatas. Subjek berada dalam keterbatasan dirinya untuk berinteraksi dengan subjek lain. Satu-satunya kondisi yang tercipta adalah bentuk keterpusatan subjek dengan menara pengawas yang diletakkan dalam ruang terpisah dengan kehadiran tunggalnya di hadapan pengawas.

Konsepsi pengawas yang mengawasi, pengawas yang diawasi, mengawasi pengawas dan pengawasan yang terawasi, menjadi bagian yang dikembangkan melalui kehadiran subjektivitas melalui formasi diskursif dalam kondisi *panoptic*. Kehadiran kompleksitas objektivikasi pengawasan yang dibentuk dalam keserempakan jejaring visualitas, berujung pada konsekuensi dan pendisiplinan yang terawasi melalui ketertataan ruang. Isu yang mengandaikan adanya dinamika dalam ruang, oleh Lim diaplikasikan dengan mengandaikan adanya ketertataan visualitas untuk menghadirkan pengawasan yang secara total diarahkan dalam membentuk integralitas antara *civil society* dengan negara yang kemudian dikonseptualkan sebagai *Soeharto's Panopticon*. Kondisi *panoptic* menjadi representasi bagaimana masyarakat dikondisikan dalam ruang-ruang berpenga-

5 *Panopticon* berakar dari kata Yunani *panopos* yang artinya 'seen by all'. Diambil dari *software Concise Oxford English Dictionary (Eleventh Edition)*.

6 Bentham, Jeremy. 1995. *Jeremy Bentham: The Panopticon Writings*. London, Verso. Dan Bandingkan dengan konsepsi Foucault dalam, Foucault, Michel. 1995. *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*. New York, Vintage Books.

wasan secara bertingkat, dari tataran administratif terendah sampai yang tertinggi sehingga tidak terdapat ruang tanpa adanya pengawasan. Pengawasan tersebut menempatkan seperangkat formasi diskursif dalam bentuk binerisme, antara yang dihadapkan dengan yang menempatkan sesuatu sebagai rujukan primernya. Rujukan primer ini yang kemudian ditempatkan dalam ruang keberkuasaan relasi diskursif.

Lim menawarkan adanya penantaan *civic space* bagi terbentuknya *civil society* yang terkontrol dan terintegrasi secara represif dengan membuat ideologi negara dapat membentuk efek secara total. Konsekuensi dari totalitas yang dibayangkan Lim membawa pada penciptaan *civic space* di luar pengawasan yang terintegrasi. Apa yang dilakukan oleh Lim membawa konsekuensi lain dari sekedar pengawasan visualitas arsitektural dengan mengintroduksi skema totalitas yang berjenjang dalam membentuk *civic space*. Dengan melihat adanya keluasan jangkauan *cyberspace*, semangat demokratisasi yang ditiadakan oleh negara mendadak ada dan beroperasi di dalamnya. Selanjutnya, bagaimana ketika negara tampil bersamaan dengan adanya pasar yang bergerak cair dan meniadakan bentuk represifnya? Lalu bagaimana transformasi yang represif hadir di dalam *cyberspace*?

Kedua persoalan tersebut muncul pada isu tentang tatapan yang dibentuk dalam kontradiksi yang hadir secara bersamaan, yakni pada bentuk *scopophilia* yang kehadirannya dalam bayangan *scopophobia* dan membentuk efek pada hadirnya sistem pengetahuan (Fenichel dalam Evan dan Hall, 2005). Dalam pengetahuan ini dihadirkan apa yang tertampakkan dan apa yang kemudian tidak ditampakkan darinya atau sebagai multiplisitas formasi pengetahuan yang bekerja dalam tatanan psikis dan melahirkan bentuk sosial yang melampaui individualitas. Bentuk sosial ini dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana sebuah pengetahuan merupakan produk dari sosial.

Tatapan sebagai titik pemaknaan melalui mata sehingga mata sebagai bagian dari organ dengan fungsinya dan merepresentasikan tubuh sebagai tempat beroperasinya relasi kuasa (Foucault dalam Thomas Gora, Suzanne Guerlac, and, Lee Hildreth, 1975). Mata dan tubuh merepresentasikan bagaimana kekuasaan menyentuh permukaan dan menusuk hingga ke dalam ketidaksadaran manusia yang sempurna sehingga kesadaran yang dimunculkan merupakan bentuk dari ketidaksadaran itu sendiri. Yang dihadirkan sebagai yang fungsional dalam relasinya pada yang lain dan sebagai yang membentuk identitas subjek dalam menghadirkan ketidaksadaran dirinya.

Ketidaksadaran pada adanya formasi diskursif dalam menghadirkan subjektivitas dalam *civic space* berujung pada beroperasinya oposisi biner. Dalam pengertian, yang terdistribusi atau bekerjanya mekanisme objektifikasi atas realitas pada penataan visualisasi realitas itu sendiri. Melalui hal tersebut, seluruh objek terbagikan dalam distribusi kategorial.

Subjek dalam kerangka *panoptic* ini tidak lagi dibayangkan sebagai subjek yang memiliki kesadaran penuh dalam menghadirkan dirinya melainkan subjek yang terinterpelasi kedalam formasi diskursus. Artinya, otonomisasi interpelasi subjek terletak pada formasi diskursus yang menciptakan realitas dalam ketertataan dalam heteronormativitas (Spivak, 2012). Interpelasi subjek muncul di hadapan pengetahuan ketika pengetahuan yang berpusat pada rasionalitas ini menghadirkan dirinya. Di sisi lain, pengetahuan menyimpan kehendak untuk menguasai realitas dalam kategorisasi yang bersumber pada pengetahuan. Dalam konteks ini, pengetahuan/kuasa menghadirkan sebuah strategi untuk menata subjek dalam ketertataan secara sosial. Dengan demikian, kekuasaan tidak dapat lagi dilokalisasi pada satu pusat. Kekuasaan menjadi berserbak kehadiran ketika pengetahuan/kuasa mampu mengkategorikan realitas ke dalam pendistribusian objek kuasa. Pendistribusian objek kuasa merupakan usaha

untuk menata realitas secara normatif. Pada titik ini normalitas berkerja dalam kerangka produktivitas dirinya. Oleh sebab itu, realitas dibayangkan dalam kerja distribusi dan inter-pelasi subjek yang berkerja secara diskontinuitas dan berserbakehadiran.

Ruang yang tercipta dalam relasi kuasa/ pengetahuan menciptakan praktik-praktik pendisiplinan. Hal ini terjadi ketika pengawasan dan pendisiplinan subjek mengubah relasinya sebagai objek yang dihadapkan pada pemusatan kontrol dirinya. Manusia mengubah dirinya sebagai subjek yang mampu menempatkan dirinya dalam ruang normatif dan menciptakan ruang bagi subjek untuk melepaskan bentuk pengawasan dirinya. Pelepasan pada pengawasan ini dilakukan seiring dengan penciptaan realitas yang dalam konteks ini dimaksudkan untuk menekankan pada bagaimana realitas digubah dalam bentuk visual dan diproduksi secara diskontinu dalam ruang sosial.

Dalam diskontinuitas ini, subjek terobjekkan sebagaimana bekerjanya pengawasan, tetapi dalam diskontinuitas ini realitas tidak lagi berkerja dalam kerangka kerja hirarkhis yang menempatkan satu elemen sebagai basis dari bekerjanya praktik sosial. Di dalam dan melalui diskontinuitas ini, setiap ruang yang tercipta dengan kehadiran objek di dalamnya bermain dalam heterogenitas. Hal tersebut dimaksudkan dalam melakukan penataan terhadap subjek dan realitas sehingga relasi kuasa/ pengetahuan ditampakkan pada posisi berserbakehadiran. Dengan demikian, relasi produktif dan konsumtif yang teregulasi dalam ruang-ruang sosial, khususnya *cyberspace*, merepresentasi realitas dalam heterogenitas yang kemudian menghadirkan formasi identitas bagi subjek. Penciptaan kuasa dan perlawanan atas relasi/ pengetahuan berada pada prinsip berkeserbakehadiran dan relasi produktif.

Bagaimanakah prinsip permainan kuasa/ pengetahuan dalam *Cyberspace*? Melalui penelusuran informasi, terdapat beberapa hal

yang memiliki keserupaan dengan prinsip di atas. Subjek dan kebertubuhannya dalam *cyberspace* dihadirkan melalui pengalaman momentual dan berubah pada bentuk pengalaman teknologis. Pada pengertian bagaimana pengetahuan dimulai dengan tatapan dimaksudkan oleh peneliti untuk menempatkan relasi kehadiran dengan menekankan pada memori momentual yang berketubuhan.

Tatapan merupakan simulasi dari mata, sedangkan mata merujuk pada tubuh dan penataannya pada rasionalitas. Dalam konteks ini, *cyberspace* mampu menghadirkan bentuk kehadiran yang melampaui yang tertata dalam bentuk rasionalitas. Dengan demikian, memori momentual kebertubuhan banyak dimainkan di dalamnya, yaitu bagaimana memori momentual ini berubah menjadi memori teknologis.

Subjek menghadirkan memori momentualnya ke dalam bentuk memori teknologis. Perubahan memori dilakukan dalam bentuk tekstualitas memori momentualnya. Kehadiran subjek memberikan pengodean dan objektivikasi pada relasi diskursus yang hendak direfleksikan. Kehadiran yang reflektif ini memberikan ruang pada subjek untuk membentuk realitas. Maksudnya adalah kehadiran relasi kuasa/ pengetahuan dalam pengertian yang produktif. Dengan adanya pengetahuan yang merujuk pada rasionalitas terhadap penataannya, poin ini dimaksudkan pada kehadiran yang momentual dan melampaui penataan berbasis rasionalitas.

Melampaui adalah ketika memori momentual dihadirkan pada pengalaman kebertubuhan. Dengan demikian, merefleksikan kondisi yang personal sekaligus dapat menunjukkan kesan sosial dalam merefleksikan dirinya. Sementara itu, rasionalitas mempunyai kemampuan untuk menata memori momentual ke dalam bentuk normalisasi dan merujuk pada oposisi biner penghadirannya. Oleh sebab itu, bentuk rasionalitas ini tidak mampu menunjukkan dan merefleksikan kondisi sosial dalam

menciptakan subjek. Dalam pengertian yang lain, rasionalitas membentuk penataan subjek dalam kerangka objektifikasinya dan pada memori momentual yang dihadirkan olehnya.

Memori momentual yang berubah dalam memori teknologis ditunjukkan pada bagaimana pewaktuan ditunjukkan dengan jelas. Mulai dengan tanggal dan jam, visualitas dan tekstualitas, hingga pada perujukan jejak kehadiran dan asal-usul bentuk formasi yang ditampilkan subjek. Pewaktuan ini menekankan pada bagaimana sebuah mesin atau teknologi mengatur subjek dalam relasi objek.

Mesin menghadirkan waktu dalam kerangka menghidupi subjek. Dalam pengertian bahwa hanya melalui pewaktuan, subjek dapat dirujuk pada momen penghadirannya. Waktu menjadi tolak ukur memori teknologis dalam kehadiran subjek. Dengan demikian, subjek menghilang dalam kerangka penciptaan subjek pada relasi kuasa/pengetahuan dan penciptaan subjek melalui kehadiran yang visual dan tekstual.

Model *panopticon* menghadirkan menara dengan lampu sorot sebagai teknologi pengawasan atas subjek, sedangkan *cyberspace* merupakan kehadiran momen teknologi yang merepresentasikan teknologi pengawasan. Hal itu merujuk pada kehadiran pewaktuan atas kehadiran subjek. Pewaktuan ini menjadi penting ketika waktu dipersepsikan sebagai teknologi pengawasan yang disebabkan waktu bekerja dalam bentuk keterputusannya pada waktu kehadiran.

Dengan penekanan pada waktu, *cyberspace* menjadi transparan dalam pengawasan subjek. Konsep transparansi menunjukkan bahwa kuasa bekerja secara *visible* dan *unverifiable* (Foucault dalam Evans dan Hall, 2005). Dalam tulisan ini, kuasa tampak bukan karena ditampakkan dalam kewaktuan yang tidak terverifikasi pada kehadirannya tetapi pada

bagaimana kuasa subjek ditampakkan pada keterputusan waktu secara definitif. Waktu kehadiran secara teknologis menjadi sangat terpisah pada momen *encoding* dan *decoding* (Hall dalam During, 2001).

Kuasa beroperasi secara produktif dalam menciptakan praktik subjek. *Cyberspace* ditampakkan dalam bentuk keterputusan kehadiran pada momen objektivitas kehadiran. Melalui keterputusan tersebut, subjek menempatkan posisinya yang seolah-olah menjadi transparan dalam melakukan praktik formasi kehadiran yang bersifat heterogen berdasarkan konteks pada petanda teks.

Teks yang ada merupakan bagian dari yang visual, yang tertatap oleh mata, dan kemudian diformasikan. Dalam konteks ini, formasi yang ditampakkan menghadirkan jejaring transparan dalam keterdataan, dalam waktu yang ditampilkan di dalamnya. Keterdataan ini merupakan bagian dari ruang sosial yang di dalamnya bermain sistem pengawasan atas subjek. Subjek yang tertata dalam transparansi *cyberpanoptic*, merupakan subjek yang bermain dalam kuasa/pengetahuan melalui memori teknologis yang terfragmentasi dalam heterogenitas penafsiran atasnya.

Eksperimentasi<sup>6</sup> sebagai bentuk ketidak-sadaran untuk “menjadi” dan “kejadian” secara teknologis dapat dilacak asal-usulnya, terutama melalui penjejakan teknologis. Hal itu mengandaikan adanya seperangkat kepekaan dalam tatapan dan kemampuan dalam mengatasi keruangan teknologis ketika apa yang ditampilkan dapat dilacak hingga pada tataran subjek yang bereksperimentasi. Namun, ketika mengandaikan adanya *civic space* yang berada pada imajinasi keterhubungan secara teknologis justru berujung pada meniadakan momen pembentukan pengetahuan.

Lokalitas dan materialitas yang menyusun subjektivitas menjadi bagian dari heterogenitas

7 Bandingkan dengan konsep “*Experimentation and self-reflection sneak up on you. You begin the process of building an avatar to play a game or join an online community; you imagine that it will be a simple matter, but then, suddenly, it is not.*” Turkle, Sherry. 212. *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. New York, Basic Books. Hlm. 212.

*civil society* dibentuk menjadi ketersediaan dalam narasi visualitas dengan mereduksinya menjadi sebetuk tatanan informasi yang dapat segera diobjektivikasi. Dalam pengertian ini *cyberspace* menjadi bagian dari medium yang menghendaki kesegeraan objektivitas dan peniadaan formasi sosial pembentuk visualitas. Dalam konteks ini formasi yang dihadirkan oleh subjek membentuk pengetahuan yang terfokus pada kesegeraan mengobjektivikasi dan menghadirkan eksperimentasi atas dirinya. Persoalan interpelasi yang bekerja dalam struktur virtual menjadi bentuk aplikasi ketidaksadaran yang bekerja melalui batas-batas kehadiran subjek.

Melalui *cyberspace*, subjektivitas yang dibayangkan dapat bereksperimentasi dalam ketercepatan momen teknologis dihadapkan pada kondisi kesegeraan dalam merespons apa yang hadir di hadapannya. Dalam fitur *Facebook*, hal ini ditampakkan pada *write what you think, comment, like it* atau dalam jejaring lain tampak pada *menandatangani petisi, tweet, dan comment*. Momen reflektivitas diposisikan menjadi kondisi dalam batas ruang dan ketercepatan dalam menghadirkan subjektivitas yang harus menjadi seketika mungkin ada dan berhadapan dengan partikularitas virtual. Sebetuk ketertataan virtualitas yang beroperasi dalam tatanan kebahasaan tampil sebagai multiplisitas berbasis heteronormativitas.

*Civic space* yang diasumsikan membangun ruang bagi tatanan *civil society* berujung pada formasi virtual bagi pemenuhan jangkauan gerak keterhubungan dengan pasar dan membentuk subjektivitas yang ditempatkan sebagai massa virtual. Persoalan tentang politik yang diasumsikan berbatas pada ruang nasionalitas dan secara material terikat pada batas fisik, ditempatkan dalam kerangka

jejaring informasi. Dalam konteks ini persoalan lokalitas yang hendak ditampilkan terintegrasi pada jejaring internet, diformasikan melalui program yang digagas oleh PT Telkom melalui program *Indonesia Digital Network* (IDN) dengan salah sub program yang dinamai *Indonesia Digital Society* (IDS) menyusun penghargaan yang diberi nama *Indonesia Digital Society Award* (IDSA)<sup>8</sup>. IDSA yang pertama kali diadakan pada tahun 2013 menempatkan Banyuwangi sebagai peraih penghargaan dan pada tahun 2014 kota Bogor menjadi pemenang.

Program tersebut disusun untuk membangun keterhubungan antara isu lokalitas dan partikularitas subjek, menghadirkan materialitas sebagai bagian dari pembentukan komoditas yang diarahkan untuk membentuk jejaring pasar. Dalam keseluruhan program yang disusun, PT Telkom menargetkan mendapatkan laba sebesar 10 Triliun itu dengan mengandaikan laba tersebut datang dari sektor korporasi dan UKM. Sementara persoalan pemerintahan ditempatkan dengan kerangka yang sejajar dengan korporasi. Penyejajaran yang disusun tanpa meletakkan pada persoalan komoditas yang dihadirkan mejadi rumit ketika elemen pemerintahan didorong menjadi objek yang disamakan.

Kebutuhan pemerintah untuk menghadirkan dirinya sebagai yang beradaptasi pada perkembangan teknologi dan tuntutan berkeserbahadiran dalam ruang-ruang sosial atau yang dikonseptualisasikan sebagai *E-Governance*, menjadi bagian yang terpisah dan ditempatkan sebagai yang berkesamaan dengan korporasi dalam menghadirkan komoditas dan pelayanan (lihat Haryatmoko, 2013). *E-Governance* menghendaki terbentuknya ruang virtual yang menghubungkan *citizen* sebagai yang dapat mendapatkan informasi dan pelayanan tanpa dibatasi persoalan

8 Dalam konteks isu IDN dan IDSA, selengkapnya dapat dibaca melalui, "Dorong Digital Society, Banyuwangi Panen Penghargaan". <http://news.detik.com/read/2013/04/30/120920/2234013/475/dorong-digital-society-banyuwangi-panen-penghargaan>. "PT Telkom Lanjutkan Indonesia Digital Society", <http://www.investor.co.id/home/pt-telkom-lanjutkan-indonesia-digital-society/75457>. "Bogor Raih Penghargaan Indonesia Digital Society Award" <http://m.liputan6.com/tekno/read/2047739/bogor-raih-penghargaan-indonesia-digital-society-award#sthash.H7RFG6Oj.dpuf>. Diunduh pada tanggal 25 Mei 2014, Pukul 21.00.

administrasi-birokrasi. Dengan ruang virtual yang dihidupkan negara melalui korporasi yang dimilikinya, menyusun strategi untuk mengintegrasikan *civil society* dan *political society* berbasis jejaring informasi untuk mengadirkan partikularitas melalui kehendak yang impulsif dan terukur secara ekonomis.

### E. Simpulan

*Cyberspace* hadir tersusun melalui jejaring teknologi, perkembangan mutakhir sistem pengetahuan, dan gerak formasi kuasa dalam menciptakan ruang. Hal tersebut berkonsekuensi pada penciptaan pengawasan subjek melalui pendisiplinan yang secara partikular hadir sebagai ketidaksadaran massa. Peniadaan autentisitas yang berkesegeraan untuk direspons di dalam *cyberspace*, berujung pada tersusunnya *cyberpanoptic* sebagai bagian dari pengawasan subjek.

Persoalan *civic space* ditempatkan sebagai yang dibentuk sebagai pendobrak ketertataan materialitas atas nama negara. Dengan demikian, menjadi bagian yang terbentuk sebagai perluasan pasar dan standarisasi organisasi sosial untuk membentuk digitalisasi realitas. Pada titik ini realitas berujung pada penghidupannya secara virtual dan berkeserbahadiran. Adanya subjektivitas yang menyusun dan mengisi parsialitas ruang menjadi bagian yang turut bereksperimentasi dalam kondisi mengada dan sekaligus tertata dalam pengawasan formasi kuasa.

### Daftar Pustaka

Althusser, Louis. 2004. *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta: Jalasutra.

Benedikt, Michael. 2000. "Cyberspace; First Stapes." Dalam Bell, David., and Kennedy, Barbara M (ed). *The Cybercultures Reader*. London: Routledge.

Bentham, Jeremy. 1995. *Jeremy Bentham: The Panopticon Writings*. London, Verso.

Bogor ... 2014. "Bogor Raih Penghargaan Indonesia Digital Society Award" <http://m.liputan6.com/tekn/read/2047739/bogor-raih-penghargaan-indonesia-digital-society-award#sthash.H7RFG6Oj.dpuf>. Diunduh pada tanggal 25 Mei 2014, Pukul 21.00.

Dalam .... 2014. "Dalam 5 tahun terakhir, jumlah pengguna internet Indonesia naik 430 persen (GRAFIK)." <http://id.techinasia.com/dalam-5-tahun-terakhir-jumlah-pengguna-internet-indonesia-naik-430-persen-grafik/>. Didownload tanggal 18 Mei 2014, pukul 20.00 wib.

Dorong .... 2014. "Dorong Digital Society, Banyuwangi Panen Penghargaan." <http://news.detik.com/read/2013/04/30/120920/2234013/475/dorong-digital-society-banyuwangi-panen-penghargaan>. Diunduh pada tanggal 25 Mei 2014, Pukul 21.00.

Fenichel, Otto. 2005. "The Scopophilic Instinct and Identification." Dalam Evans, Jessica dan Hall, Stuart. *Visual Culture The Reader*. London: Sage.

Foucault, Michel. 1975. "The Eye Of Power." dalam *Schizo-Culture*. Thomas Gora, Suzanne Guerlac, and, Lee Hildreth (ed). Semiotext. Vol III, No 2.

Foucault, Michel. 1995. *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*. New York: Vintage Books.

Foucault, Michel. 1999. *Panopticon*. Dalam Evans, Jessica dan Hall, Stuart. *Visual Culture The Reader*. London: Sage .

Foucault, Michel. 2002. *Kegilaan dan Peradaban Madness and Civilization*. Yogyakarta: Ikon

- Gramsci, Antonio. 1992. *Selections From The Prison Notebooks Of Antonio Gramsci*. Edited And Translated By Hoare, Quintin., And, Nowell, Geoffrey, Smith. New York: International Publishers.
- Hall, Stuart. 2001. *Encoding Decoding. Dalam During, Simon. The Cultural Studies Reader*. London: Routledge.
- Haryatmoko. 2013. *Etika Publik: Untuk Intergritas Pejabat dan Politisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hill, T. David, dan Sen, Krishna. 2005. *The Internet in Indonesia's New Democracy*. Canada: Routledge .
- Jameson, Fredric. 1984. "Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism." *New Left Review*, 146:59-92.
- Kartajaya, Hermawan. 2013. *Rethinking ASEAN: Marketing in Post-2015 Dipresentasikan pada "AMF International Marketing Conference 2013*. Bangkok, 17 Mei 2013.
- Kemkominfo. 2014. "Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang." [http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita\\_satker](http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker). Diunduh tanggal 18 Mei 2014, pukul 20.00 wib.
- Kemkominfo. 2014. "Pengguna Internet di Indonesia Capai 82 Juta." [http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita\\_satker#.U3iszXZ-nDc](http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker#.U3iszXZ-nDc). Social, Digital & Mobile in 2014 <http://wearesocial.sg/blog/2014/01/social-digital-mobile-2014/>. Diunduh tanggal 18 Mei 2014, pukul 20.00 wib.
- Krissantono (ed). 1976. *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*. Jakarta: Yayasan Proklamasi dan Center for Strategic and International Studies (CSIS).
- Lim, Merlyana. 2002. "Cyber-civic space in Indonesia: From panopticon to pandemonium?" *International Development Planning Review*. 24 (4) 384-400.
- Lim, Merlyana. 2014. "Cyber-Urban Activisme and Political Change in Indonesia." [http://www.public.asu.edu/~mlim4/files/Lim\\_M\\_8\\_pubs.pdf](http://www.public.asu.edu/~mlim4/files/Lim_M_8_pubs.pdf) Didwonload Tanggal 17 Mei 2014. Pukul 04.00.
- Lim, Merlyana. 2014. "The Internet, Sosial Networks, and Reform In Indonesia." [http://jaromil.dyne.org/journal/documents/Internet\\_in\\_Indonesia\\_MerlyanaLim2004.pdf](http://jaromil.dyne.org/journal/documents/Internet_in_Indonesia_MerlyanaLim2004.pdf). Diunduh Tanggal 20 April 2014. Pukul 13.00.
- PT .... 2014. "PT Telkom Lanjutkan Indonesia Digital Society." <http://www.investor.co.id/home/pt-telkom-lanjutkan-indonesia-digital-society/75457>. Diunduh pada tanggal 25 Mei 2014, Pukul 21.00.
- Robinson, Ricard. 2009. *Indonesia The Rise Of Capital*. Jakarta-Kuala Lumpur: Equinox Publishing.
- SembilanPetisi.2014. "9PetisiOnlineYangBerhasil di 2013". 2014. <http://www.tempo.co/read/news/2013/12/31/072541293/9-Petisi-Online-Yang-Berhasil-di-2013/1/0>. Diunduh 20 Mei 2014. Pukul 20.00. Wib
- Setyaningrum, Arie. 2014. "Avatar: 'Visualizes yourself' (Estetika Populer dan Identitas dalam Technoculture)." <http://kunci.or.id/articles/avatar-visualizes-yourself-estetika-populer-dan-identitas-dalam-technoculture-oleh-arie-setyaningrum/>. Diunduh Tanggal 28 Februari 2014. Pukul 13.00.
- Spivak, Gayatri Chakravorty. 2012. *An Aesthetic Education in the Era of Globalization*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Statistik .... 2014. "Statistik pengguna internet di Asia dan Indonesia (slideshow)." <http://id.techinasia.com/statistik-pengguna-internet-di-asia-dan-indonesia-slideshow/>. Diunduh tanggal 18 Mei 2014, pukul 20.00 Wib.
- Turkle, Sherry. 2012. *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. New York: Basic Books.
- Turkle, Sherry. 2014. Dalam Dreyfus, Hubert. *Kierkegaard on the Internet: Anonymity vrs.*

*Commitment in the Present Age*. [http://socrates.berkeley.edu/~hdreyfus/html/paper\\_kierkegaard.html](http://socrates.berkeley.edu/~hdreyfus/html/paper_kierkegaard.html). Diunduh pada tanggal 21 April 2014. Pukul 21.00.

Usman. 2014. "Usman Hamid & Arif Azis: Mengubah Indonesia dengan Petisi. 2013." <http://www.perspektifbaru.com/wawancara/920>. Didownload 20 Mei 2014. Pukul 19.10. Wib.